

## Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika (*Citizenship Education in Amerika*) dan Indonesia: Studi Komparatif

M. Januar Ibnu Adhama<sup>\*1,2</sup>, Kokom Komalasari<sup>1</sup>, T Heru Nurgiansah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr.Setiabudi, No. 229, West Java 40154, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggo Waluyo, Karawang 41361, Indonesia

\*korespondensi penulis m.januar.ibnuadham@upi.edu

### Informasi Artikel

**Received:**

02/01/2024

**Accepted:**

30/04/2024

### ABSTRAK

Berbagai isu-isu global yang terus menghantui negara-negara di dunia menjadi kekhawatiran bersama terutama berkenaan dengan eksistensi warga negaranya, Indonesia dan Amerika memiliki kesamaan dalam penerapan pendidikan kewarganegaraannya hal tersebut dikarenakan Indonesia telah menggunakan beberapa sistem dan bahkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika. Berdasarkan kajian literatur yang ditemukan oleh penulis bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Amerika telah ditemukan banyak kesamaan mulai pada kebijakan nasional dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia yang dapat dinilai sebagai pendidikan kewarganegaraan yang mengarah lebih dekat ke dalam kontinum pendidikan kewarganegaraan maksimal.

**Kata kunci :** pendidikan kewarganegaraan, perbandingan civics, perbandingan pendidikan

### ABSTRACT

*Various global issues that continue to haunt countries in the world are of common concern, especially regarding the existence of their citizens, Indonesia and the United States have similarities in the application of civic education because Indonesia has used several systems and even the civic education curriculum in America. Based on the literature review found by the author, civic education in Indonesia and the United States has found many similarities starting from national policies and the content of the civic education curriculum in the United States and Indonesia which can be assessed as civic education that leads closer to the maximum civic education continuum*

**Keywords:** civic education, comparison of civics, comparison of education

Copyright © 2024 (M. Januar Ibnu Adhama, Kokom Komalasari, T Heru Nurgiansah). All Right Reserved

**How to Cite:** Adhama, M.J.I., Komalasari, K. Dan Nurgiansah, T.H. (2024). Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika (Citizenship Education in Amerika) dan Indonesia: Studi Komparatif. Jurnal Ilmiah MIMBAR Demokrasi, 23(2), 374-384. DOI. 10.21009/jimd.v23i2.42240



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wadah yang sangat vital dalam memberikan pemahaman kebangsaan bagi masyarakat suatu negara (Ünal & Kaygın, 2019). Hal ini dikarenakan secara substantif, materi kewarganegaraan berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan disiplin sosial dan menumbuhkan komitmen untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Levy et al., 2023). Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, hubungan dengan negara, serta konsep kebangsaan yang muaranya adalah menjadi warga Negara berkarakter yang paham akan hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat, maupun Negara (Lin & Jackson, 2019). Menurut Joris dan Agirdag (2019), pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya menitikberatkan pada pembentukan manusia yang religius, demokratis, cerdas, terampil, dan sejahtera, menjadi pribadi yang mencintai serta mampu menjaga nama baik martabat bangsa dan negara. Sementara itu menurut Engartner dan Schedelik (2023), sebagai ujung tombak dalam pembangunan bangsa, tujuan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya untuk mendidik warga negara menjadi goodcitizenship, dengan memahami hak dan kewajiban, tetapi juga untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu warga negara agar paham dengan politik sehingga ikut berpartisipasi dalam sistem politik sebagai perwujudan sistem demokrasi. Keseluruhan tujuan tersebut di atas merupakan modal untuk ikut berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang baik dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Mengingat esensi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara yang baik, maka pendidikan kewarganegaraan menjadi kurikulum yang penting di banyak negara (Gómez & Suárez, 2023).

Lahirnya pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari perkembangan dan sejarah dari suatu negara. Hal ini karena pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh latar belakang suatu bangsa (Feitosa, 2020). Dinamika yang terjadi berpengaruh terhadap muatan yang terinternalisasi dalam materi kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara tersebut. Amerika Serikat menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai media untuk memastikan golongan imigran merasa menjadi bagian dari Amerika sepenuhnya. Sementara di bagian Asia Timur, Jepang menjadikan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kembali bangsa Jepang yang kalah dalam perang dunia II dengan berorientasi pada pengalaman, pengetahuan dan kemampuan (Piel, 2019). Indonesia mengalami pasang surut perubahan sistem pendidikan sejak era kolonialisme (Suwignyo, 2023). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hanya kaum bangsawan yang dapat mengenyam pendidikan karena adanya sistem kasta dalam pendidikan masa itu. Kemudian di masa pendudukan Jepang, sistem kasta dihilangkan sehingga kaum menengah ke bawah bisa mengecap pendidikan. Meski Jepang menerapkan kurikulum yang mencampurkan kurikulum Jepang dengan kurikulum lokal, pendidikan diarahkan untuk mengaplikasikan Nipponize dan membentuk masyarakat yang siap membela Jepang dalam perang dunia II. Kurikulum yang di susun Jepang terkesan hanya untuk memobilisasi masyarakat Indonesia untuk kepentingan perang. Adanya program Jepangisasi memang tak berlangsung lama, karena dalam tiga setengah tahun Jepang menyerah kalah dalam perang dunia II.

Pendidikan kewarganegaraan pada era pasca kolonialisme pun mengalami fluktuasi dan berkembang semakin kompleks dan dinamis (Idrus et al., 2020). Pada awal kemerdekaan, upaya untuk membangun karakter tercermin dari konsep pembangunan mental (lebih dikenal dengan pembangunan karakter bangsa) yang dikemukakan oleh Soekarno untuk membangkitkan mental bangsa yang merasa masih rendah akibat penjajahan (Jeffery-Schwikkard et al., 2024). Konsep ini di pandang penting untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dalam rangka membangun negara yang berdaulat. Selain itu, melalui konsep ini juga nilai-nilai karakter ditanamkan kepada masyarakat. Di era globalisasi yang tak terbendung sekarang, urgensi pendidikan kewarganegaraan makin terasa untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik sehingga perlu dipelajari oleh generasi muda (Casmana et al., 2022). Sedangkan di Amerika Pelajaran *Civics* mulai diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka meng-Amerika-kan bangsa Amerika (*Theory of Americanization*), berorientasi pada pendidikan karakter, patriotisme, *civil government* dan metode pengajarnya berorientasi pada *Faculty Psychology*. Amerika Serikat yang merupakan negara asal pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Liu, 2023). Amerika Serikat

merupakan salah satu negara adikuasa di dunia karena kekuatan ekonomi dan politiknya, serta merupakan negara berpengaruh di dunia. Pelajaran *Civics* atau pendidikan kewarganegaraan mulai diperkenalkan di Amerika Serikat dalam rangka “mengamerikakan bangsa Amerika” atau yang terkenal dengan nama “*Theory of Americanization*”. Bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat dan untuk menyatukan menjadi bangsa Amerika maka perlu diajarkan *Civics* bagi warga negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut, pelajaran *Civics* membicarakan tentang *government*, hak dan kewajiban warga negara dan *Civics* merupakan bagian dari ilmu politik (Weinberg, 2021). Namun terdapat kesenjangan prestasi akademik yang terus-menerus dan siswa yang semakin beragam di seluruh dunia, banyak negara menghadapi kesulitan serius dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, skenarionya adalah sangat menantang bagi guru yang bekerja dalam konteks pelaksanaan segregasi sekolah didorong oleh kesenjangan sosial-ekonomi yang terus-menerus, migrasi, dan etnis, ras, budaya, dan perbedaan linguistik (Kayaalp, 2019).

Perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dan Indoensia dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan mengkomparasikan sejarah dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. Menurut Tröhler (2023), perbandingan pendidikan merupakan studi yang bertugas membandingkan teori dan praktik pendidikan di beberapa negara untuk memperluas pandangan di luar batas negara itu sendiri. Selain itu menurut Luoto (2023) perbandingan pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip comparable (layak dibandingkan), setaraf, dan relevansi aspek perbandingan. Dengan demikian, maka akan terlihat persamaan dan perbedaan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. Pembahasan pada artikel ini difokuskan pada kebijakan nasional dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat dan Indoensia. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari aspek kebijakan nasional di negara Amerika Serikat dan Indonesia, dan (2) untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari aspek konten kurikulum di negara Amerika Serikat dan Indoensia.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Literatur review yang bersumber dari bahan bacaan primer berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Literature review adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap literatur atau karya tulis yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang sedang dibahas. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial. literature review adalah metode yang penting dalam penelitian karena membantu mengidentifikasi penelitian terdahulu, menyediakan konteks teoritis, menyajikan bukti pendukung, mengidentifikasi metode penelitian yang sesuai, dan mengidentifikasi kekurangan pengetahuan dalam bidang tertentu. Dengan memanfaatkan literatur terdahulu, peneliti dapat membangun dasar teoritis yang kuat, merumuskan pertanyaan atau hipotesis yang relevan, dan merancang metode penelitian yang efektif. Hasil review dengan berbagai ahli pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diperkuat dengan berbagai literatur dan referensi yang ada baik di jurnal nasional, jurnal internasional dan buku yang relevan dan kompatibel.

## Hasil dan Pembahasan

### Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan di sudah berkembang sejak era kolonial. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan kewarganegaraan di kenal dengan istilah Burgerkunde. Pembelajaran pada masa itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat patuh kepada pemerintahan Hindia Belanda dan tidak menganggap Belanda sebagai musuh dengan pengenalan akan hak dan kewajiban terhadap Hindia Belanda (Setyaningrum & Misbah, 2023). Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia belanda. Pada masa kolonial Jepang, sistem pendidikan versi Hindia Belanda dihapus. Sistem pendidikan tanpa kasta diterapkan agar semua kalangan bisa merasakan pendidikan. Namun tak berapa lama kemudian, Jepang mengarahkan pendidikan untuk menanamkan ajaran Hakko Ichiu sehingga misi Nipponize berhasil. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang terkesan untuk menarik simpati masyarakat agar mau membela Jepang dalam Perang Dunia.

Cikal bakal pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan dapat di lihat pada tahun 1947 ketika dalam kurikulum “Rentjana Pelajaran” Sekolah Rakyat sudah ada tujuan untuk membentuk dan membangun warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, namun tujuan ini belum terwadahi dalam mata pelajaran khusus dengan nama pendidikan kewarganegaraan dan sejenisnya (Hillygus & Holbein, 2023). Muatan ini diwadahi dalam Budi Pekerti (kelas 1 s/d 4) dan Pendidikan Agama (kelas 4 s/d 6). Menurut Alhamuddin (2014), kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka masih meniru rencana pembelajaran yang ada di masa kolonial. Pendidikan kewarganegaraan secara nomenklatur baru muncul sepuluh tahun kemudian (1957) dengan nama Kewarganegaraan. Mata pelajaran kewarganegaraan diperkenalkan bersamaan dengan mata pelajaran tata negara dan tata hukum yang membahas tentang negara. Pada awal kemunculannya, kewarganegaraan hanya bermuatan hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

Hanya berselang dua tahun, mata pelajaran Civics diperkenalkan sebagai pengganti kewarganegaraan pada tahun 1959. Perubahan terjadi sebagai respon perubahan arah politik negara Indonesia waktu itu dimana UUD 1945 diberlakukan kembali untuk menggantikan UUDS (Undang- Undang Dasar Sementara) 1950. Adapun materi yang wajib diajarkan adalah Sejarah Nasional, Sejarah Proklamasi, UUD 1945, Pancasila, dan Pidato-pidato Kenegaraan Presiden. Metode pembelajaran di masa ini cenderung bersifat indoktrinasi. Hal ini tercermin dari buku yang dijadikan pegangan, yakni “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” yang berisikan: 1) lahirnya Pancasila; 2) UUD 1945; 3) manifesto politik; 4) pidato presiden tanggal 17 Agustus 1960 (Penemuan Kembali Revolusi Kita); 5) pidato presiden di depan PBB tanggal 30 September 1960 (The World A New); 6) Manipol-usdek (manifesto politik dan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1962, Civics berganti nama menjadi Kewargaan Negara. Penggantian nomenklatur ini merupakan anjuran dari Dr. Sahardjo, S.H yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dengan dasar tujuan yang ingin diwujudkan , yaitu membentuk warga negara yang baik (Kurniawan, 2018). Namun perubahan politik yang terjadi akibat peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 dan diikuti peristiwa penyerahan surat perintah 11 Maret 1966 oleh Soekarno kepada Soeharto berdampak pula pada kebijakan pendidikan termasuk kewargaan negara.

Pada tahun 1968 diperkenalkan kurikulum baru yang di kenal dengan nama Kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama (Alhamuddin, 2014). Materi pendidikan kewarganegaraan yang ada di masa orde lama dianggap sudah tidak relevan oleh orde baru. Sebagai gantinya, pada kurikulum 1968, diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang mempelajari tentang: 1) Pancasila, 2) UUD 1945, 3) Ketetapan-Ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, 4) Hak Asasi Manusia, dan 5) beberapa materi yang bermuatan sejarah, geografi, dan ekonomi (Sunarso, 2012). Pembagian materi dalam berbagai jenjang pun terlihat lebih kompleks. Untuk tingkat SD, materi yang harus diajarkan yakni: 1) Pengetahuan Kewargaan Negara, 2) Sejarah Indonesia, dan 3) Ilmu Bumi. Untuk tingkat SMP, materinya yakni: 1) Sejarah kebangsaan, 2) kejadian pasca kemerdekaan, 3) Pancasila, 4) UUD 1945, dan 5) Ketetapan MPR. Sementara untuk SMA, yakni uraian dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dihubungkan dengan sejarah, tata negara, ekonomi, dan ilmu bumi.

Pada tahun 1973, melalui GBHN 1973 pemerintah mulai menekankan tentang orientasi pendidikan kewarganegaraan yakni pembentukan warga negara yang Pancasila. Melalui produk GBHN, pemerintah mengubah muatan dalam pendidikan kewargaan negara dari kurikulum 1968 menjadi bermuatan nilai-nilai dalam sila Pancasila serta pesan-pesan tentang pembangunan Indonesia (Samsuri, 2012). Sebutan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) digaungkan sebagai pengganti Pendidikan Kewargaan Negara pada kurikulum 1975. Selain itu, melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka materi mata pelajaran PMP juga didominasi oleh materi P-4 sehingga bisa dikatakan bahwa P-4 menjadi arah atau pedoman warga negara Indonesia dalam bertingkah laku. Materi P-4 tetap dipertahankan sebagai bagian dari PMP pada kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan penyempurnaan pada tujuan pembelajaran pada aspek afektif, kognitif dan psikomotor. PMP sebagaimana difungsikan sebagai pendidikan karakter bangsa masih diajarkan dengan berkatut sebatas aspek kognitif. Padahal, dimensi PPKn sangat luas tidak hanya terbatas pada dimensi moral saja (Crone et al., 2018).

Melalui Kurikulum 1994 sebagai salah satu wujud perbaikan sistem pendidikan dan implementasi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional (SPN) diperkenalkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai integrasi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang muncul dalam UU SPN tersebut. Berdasarkan fungsi tersebut, maka fungsi yang dijalankan oleh PPKn tidak hanya sebatas pendidikan moral saja (menanamkan nilai-nilai karakter), namun juga sebagai pendidikan politik (membina kesadaran warga negara terhadap sesama dan negaranya). Di era reformasi sekarang, pendidikan kewarganegaraan bahkan memiliki perkembangan paradigma baru yang sangat kompleks. Pendidikan kewarganegaraan dituntut harus memiliki struktur keilmuan yang kuat agar dapat menjadi wahana mencapai tujuan yang digariskan oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional, yakni:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.*

Poin penting dari UU Sisdiknas ini yakni pendidikan secara umum berfokus pada pembentukan kepribadian manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia selain sebagai transfer ilmu. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di masa ini untuk mendukung dan mewujudkan fungsi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurut Darling-Hammond dan McGuire (2023), visi dari PPKn di era reformasi yakni meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, menjadi pelajaran wajib disemua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi). Menurut Fuentes-Moreno et al. (2020), warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis harus memiliki civic competences seperti yang dikemukakan oleh Bronson yaitu civic disposition (karakter kewarganegaraan), civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) dan civic skills (keterampilan kewarganegaraan). Oleh karena itu, tiga konsep civic competences ini wajib dimiliki untuk mewujudkan good citizenship dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paham akan hak dan kewajibannya.

Dalam Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan mengalami penguatan secara metodologi, dimana penekanannya diarahkan tidak hanya dalam aspek afektif dan kognitif, namun juga mengembangkan aspek psikomotor. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum 2013 menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nomenklatur PPKn pun kembali digunakan dalam pembelajaran. Posisi PPKn makin disempurnakan dengan adanya Kurikulum 2020 yang dikenal dengan nama Merdeka Belajar. Kurikulum yang di gagas oleh Mendikbud ini memiliki tiga gagasan utama, yakni: 1) teknologi untuk akselerasi, 2) keberagaman sebagai esensi, dan 3) profil pelajar Pancasila. Secara substansi, keberagaman dan profil pelajar Pancasila jelas berkaitan dengan PPKn. Internalisasi nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal diinternalisasikan dalam pembelajaran untuk menghasilkan pelajar Pancasila yang mempunyai profil bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global dan berakhlak mulia.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bagaimana dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara substansi, pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan selalu dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa. Hal ini sebagaimana menurut Österman dan Robinson (2022), bahwa perkembangan kewarganegaraan tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik penguasa. Hal tersebut tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan zaman sehingga tuntutan dalam pendidikan kewarganegaraan selalu dinamis tanpa menghilangkan makna substantif dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

### **Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika**

Di Amerika Serikat, keputusan kurikuler diserahkan kepada masing-masing negara bagian mengenai bagaimana cara yang akan digunakan dalam mempromosikan kewarganegaraan dan bagaimana cara mempromosikannya, sementara Standar Nasional hanya menyarankan konten. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Morais dan Ogden (2010) bahwa: 1) *no national policy for civics (voluntary curriculum standards) states and local districts de"ne curriculum*; 2) *national Standards suggest content*; 3) *civics is traditionally infused across the*

*social studies curriculum and often one year of a formal civics course is required in secondary school; 4) informal civics training occurs in service-learning projects and extracurricular activities.* Pada kurikulum, pengetahuan/nilai yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif yang dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara baik di arena nasional maupun internasional; kedua, mendorong partisipasi yang penuh informasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik oleh warga negara yang kompeten berkomitmen pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling bergantung Morais dan Ogden (2010). Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat menggunakan pendekatan *integrated* sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu *social studies*. Terdapat pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat dasar dan menengah di Amerika Serikat. Berikut disajikan dalam tabel 1 dan 2.

**Tabel 1.** Pengorganisasian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Dasar

<i>Country</i>	<i>Terminology</i>	<i>Approach</i>	<i>Hours per week</i>
<i>USA Kentucky</i>	<i>Social studies</i>	<i>Statutory core integrated</i>	<i>Time specified per week varies</i>

Sumber: (Kerr, 1999)

**Tabel 2.** Pengorganisasian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Menengah

<i>Country</i>	<i>Terminology</i>	<i>Approach</i>	<i>Hours per week</i>
<i>USA Kentucky</i>	<i>Social studies including civics and government</i>	<i>Statutory core and separated and integrated</i>	<i>Time specified per week varies among state</i>

Sumber: (Kerr, 1999)

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan budaya politik siswa yang terungkap dasar yang diperlukan dari budaya ideologis seseorang. Sifat khusus dari pendidikan politik adalah masyarakat dalam tugas-tugas tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan konsensus politik pandangan dunia multikultural yang disediakan oleh sistem pendidikan kewarganegaraan. Arah utama pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat adalah pengembangan kesadaran politik nilai budaya, kesadaran hukum, budaya hubungan antar etnis, motivasi kerja, pendidikan nilai moral. Pemahaman tentang kebebasan. Di samping itu, yang paling penting adalah gagasan tentang lingkungan multikultural, yang bertujuan mempersiapkan setiap warga negara untuk hidup berdampingan. Oleh sebab itu pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat berfokus pada pembentukan warga negara yang multicultural tidak terbatas pada etnosentrisme (Banks, 2020). Pengembangan kapasitas kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yaitu materi kurikulum dibuat oleh sejumlah organisasi seperti The Center for Civic Education (CCE) dan The National Council for Social Studies (NCSS). Variabel pengembangan guru menurut negara bagian dilakukan dengan koordinasi nasional melalui organisasi seperti CCE dan NCSS. Strategi implementasi kurikulum dilakukan secara tersebar dan tidak terorganisir (Hayes et al., 2023).

### **Kebijakan Nasional Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat**

Kekuasaan dapat memberikan corak dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh pengambil kebijakan (negara). Penguasa dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki dapat menentukan ingin seperti apa aspek-aspek kehidupan yang harus dijalankan menurut kepentingannya. Tidak hanya pada aspek kenegaraan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan pun dapat dijadikan alat penguasanya. Dalam konteks pendidikan, menurut Li et al. (2023) pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses penggalan dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan adalah usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup peserta didik. Pendidikan harus memungkinkan peserta didik untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sedemikian rupa sehingga ia terus bertumbuh

dan diperkaya oleh pengalaman tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan adalah subjek yang bertanggung jawab tentang bagaimana membentuk warga negara yang baik (Joris & Agirdag, 2019).

Pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh negara, hal ini dapat dilihat melalui keterlibatan negara dalam merancang dan mengarahkan kurikulum sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang baik menurut Olibie dan Akudolu harus memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberikan makna atau signifikansi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi, seperti ide atau konsep termasuk patriotisme dan hak-hak minoritas, masyarakat sipil, dan konstutualisme. Pendidikan kewarganegaraan secara luas mencerminkan sistem pemerintahan yang berlaku di setiap negara. Di Amerika Serikat, keputusan kurikuler diserahkan kepada masing-masing negara bagian mengenai bagaimana cara yang akan digunakan dalam mempromosikan kewarganegaraan dan bagaimana cara mempromosikannya, sementara Standar Nasional hanya menyarankan konten. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Morais dan Ogden (2010) bahwa: 1) no national policy for civics (voluntary curriculum standards) states and local districts dene curriculum; 2) national Standards suggest content; 3) civics is traditionally infused across the social studies curriculum and often one year of a formal civics course is required in secondary school; 4) informal civics training occurs in service-learning projects and extracurricular activities.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam menentukan kurikulum diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan. Sehingga menurut hemat penulis, karakteristik utama kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sistem sekolah di Amerika Serikat semuanya menganut sistem desentralisasi karena tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan pendidikan diatur oleh pemerintah federal. Artinya semua sistem sekolah ada di bawah kewenangan negara bagian. Hal ini membawa implikasi kebijakan tentang keuangan dan pengelolaan sekolah, kurikulum, dan pembelajaran, pengadaan buku teks dan materi kurikuler lainnya, pengadaan guru, dan upaya pembaruan berada pada kewenangan pemerintah negara bagian.

Pendidikan kewarganegaraan secara tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum studi sosial dan seringkali dalam satu tahun diperlukan kursus kewarganegaraan formal di sekolah menengah. Menurut Levy et al. (2023) mengartikan social studies atau disebut juga studi sosial sebagai studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan dan membangun kompetensi warga negara, dengan tujuan utama untuk membantu generasi muda mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang jernih dan bernalar untuk kepentingan umum sebagai warga negara dalam masyarakat yang beragam dan mendunia. Selain itu, pelatihan kewarganegaraan secara informal diberikan dalam proyek-proyek pembelajaran layanan dan kegiatan ekstrakurikuler.

### **Konten Kurikulum PKn di Amerika**

Sederet generalisasi dapat ditawarkan tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dikonstruksi sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Di Amerika Serikat, beberapa siswa mempelajari *Civics and Government* atau *Civics* dan nilai-nilai kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum studi sosial. Pendidikan kewarganegaraan biasanya ditugaskan untuk studi sosial bidang kurikulum, penilaian pembelajaran kewarganegaraan bukan merupakan elemen kunci dari latihan penilaian masuk perguruan tinggi. Buku teks disediakan di negara bagian yang memiliki komponen pendidikan kewarganegaraan, tetapi hal ini bersifat opsional. Sementara kegiatan berbasis masyarakat misalnya KKN di luar sekolah juga digalakkan secara aktif. Dalam hal fokus isi kurikulum, delapan kelompok nilai dipromosikan ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dalam semua program yaitu, penanaman diri, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang adil, kehidupan ekonomi, kohesi/ keragaman sosial, masyarakat sipil, dan identitas nasional. Amerika Serikat lebih menekankan pada bidang-bidang yang terkait dengan demokrasi, proses politik, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas.

Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, namun ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut: 1) untuk mencapai kesatuan dalam keragaman; 2) untuk mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi; 3) untuk membantu pengembangan

individu; 4) untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat; dan 5) untuk mempercepat kemajuan nasional. Sementara tujuan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat cenderung menekankan nilai-nilai yang berfokus pada hak dan tanggung jawab warga negara, keragaman sosial, dan pengetahuan kontroversial.

Menurut Ardoin et al. (2022) pendidikan kewarganegaraan harus terdiri tidak hanya pengetahuan, nilai dan keterampilan, tetapi juga mencakup penerapan pengetahuan, nilai dan keterampilan tersebut dalam situasi kehidupan nyata dengan berpartisipasi secara aktif. Dalam kurikulum Amerika Serikat, pengetahuan/nilai yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif yang dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara baik di arena nasional maupun internasional; kedua, mendorong partisipasi yang penuh informasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik oleh warga negara yang kompeten berkomitmen pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling bergantung (Morais & Ogden, 2010). Sementara menurut Alazmi (2021) pendidikan kewarganegaraan dalam *social science* atau *social studies* di Amerika Serikat pada dasarnya bermuara pada gagasan mengenai *the ideal citizen* sebagai *informed and reasoned decision maker* yang *competent, confident, and committed*. Seorang warga negara yang demokratis seharusnya tampil sebagai pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar (*informed and reasoned decision maker*). Oleh karena itu dibutuhkan *knowledge* (pengetahuan), *skills: civic participation* (keterampilan partisipasi warga negara), serta *beliefs: civic virtues* (kepercayaan berupa kebajikan warga negara). Menyatunya ketiga aspek tersebut akan menghasilkan warga negara yang berkemampuan (*competent*), berkeyakinan diri (*confident*) dan kesediaan untuk berbakti dan mengabdikan diri (*commitment*).

Di Amerika Serikat, pendidikan kewarganegaraan menggunakan pendekatan *integrated* sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu *social studies*. Terdapat pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat dasar dan menengah di Amerika Serikat. Berdasarkan tabel 1 pada hasil, dapat diketahui pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan dasar di Amerika Serikat termuat dalam mata pelajaran *social studies*. Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas sebagai materi inti yang terintegrasi (*statutory core integrated*). Beban belajar untuk setiap negara bagian bervariasi. Sementara pada tingkat pendidikan menengah disajikan pada tabel 2, dapat diketahui bahwa pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan menengah di Amerika Serikat termuat dalam mata pelajaran *social studies* dalam materi kajian *Civics and Government*. Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas sebagai materi inti yang terintegrasi atau berdiri sendiri. Beban belajar pada setiap negara bagian bervariasi. berdasarkan kedua tabel tersebut, terlihat bahwa cara pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Amerika Serikat menggunakan pendekatan *integrated* di semua tingkatan, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu *social studies*.

*Social studies* juga mengidentifikasi adanya suatu pendidikan kewarganegaraan dalam kontinum minimal dan maksimal (Kerr, 1999). Setiap kontinum memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat mempengaruhi definisi dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik dari kontinum minimal dan maksimal dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.** Kontinum Pendidikan Kewarganegaraan

<i>Minimal</i>	<i>Maximal</i>
<i>Thin</i>	<i>Thick</i>
<i>Exclusive</i>	<i>Inclusive</i>
<i>Elitist</i>	<i>Activist</i>
<i>Civics education</i>	<i>Citizenship education</i>
<i>Formal</i>	<i>Participative</i>
<i>Content led</i>	<i>Process led</i>
<i>Knowledge based</i>	<i>Values based</i>
<i>Didactic transmission</i>	<i>Interactive interpretation</i>
<i>Easier to achieve and measure in practice</i>	<i>More difficult to achieve and measure in practice</i>

Sumber: (Kerr, 1999)

Berdasarkan tabel di atas, interpretasi minimal mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan secara sempit yang hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur. Sementara interpretasi maksimal mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan secara luas yang mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal dengan menitikberatkan pada partisipasi peserta didik melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar. Hal serupa diungkapkan oleh McLaughlin (1992) yang membedakan antara kewarganegaraan minimal dan maksimal. Warga negara minimal, pada dasarnya patuh pada pemerintah yang diwujudkan dengan sikap taat hukum dan berjiwa publik tetapi dengan pertimbangan rasional dan penentuan nasib sendiri yang terbatas. Sementara warga negara maksimal adalah secara aktif mempertanyakan dan telah mencapai perspektif kritis yang tinggi tentang semua hal penting. Dengan demikian menurut hemat penulis pendidikan kewarganegaraan minimal hanya sebatas transfer pengetahuan, sementara pendidikan kewarganegaraan maksimal lebih dari itu hingga dapat membentuk warga negara pada taraf kritis terhadap hal-hal penting mengenai kewarganegaraan. Jika dianalisis berdasarkan kontinum tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat lebih mendekati pada kontinum maksimal.

## Kesimpulan

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Amerika terjadi secara dinamis sesuai dengan latar belakang sejarah negara tersebut. Muara dari pendidikan kewarganegaraan kedua negara juga memiliki kesamaan yakni membentuk pribadi warga negara sebagai good citizenship yang aktif dalam membangun negara. Perbedaan mendasar dari dinamika pendidikan kewarganegaraan keduanya adalah substansi pendidikan kewarganegaraan yang berbeda sedari awal kemunculan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Burgerkunde sebagai cikal bakal pendidikan kewarganegaraan di Indonesia oleh Belanda dijadikan sebagai alat untuk menanamkan kepatuhan masyarakat kepada pemerintah Hindia Belanda, sementara di Amerika sedari awal menanamkan pembentukan nilai moral pada pendidikan moral dan penegakan kekuatan hukum. Karakteristik utama kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yaitu menonjolnya desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam menentukan kurikulum diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Provinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Sistem sekolah di Amerika Serikat semuanya menganut sistem desentralisasi karena tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan pendidikan diatur oleh pemerintah federal. Artinya semua sistem sekolah ada di bawah kewenangan negara bagian. Hal ini membawa implikasi kebijakan tentang keuangan dan pengelolaan sekolah, kurikulum, dan pembelajaran, pengadaan buku teks dan materi kurikuler lainnya, pengadaan guru, dan upaya pembaruan berada pada kewenangan pemerintah negara bagian. Pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Amerika Serikat menggunakan pendekatan integrated di semua tingkatan, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu social studies. Dalam hal fokus isi kurikulum, delapan kelompok nilai dipromosikan ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dalam semua program yaitu, penanaman diri, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang adil, kehidupan ekonomi, kohesi/ keragaman sosial, masyarakat sipil, dan identitas nasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat cenderung menekankan nilai-nilai yang berfokus pada hak dan tanggung jawab warga negara, keragaman sosial, dan pengetahuan kontroversial. Pada kurikulum Amerika Serikat, pengetahuan/nilai yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif; kedua, mendorong partisipasi politik warga negara yang kompeten sesuai prinsip demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang bijak untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis. Untuk menghasilkan warga negara yang berkemampuan (competent), berkeyakinan diri (confident) dan bersedia untuk berbakti dan mengabdikan diri (commitment), dibutuhkan knowledge (pengetahuan), skills: civic participation (keterampilan partisipasi warga negara), serta beliefs: civic virtues (kepercayaan berupa kebajikan warga negara). Pendidikan kewarganegaraan Amerika Serikat mengarah lebih dekat ke pendidikan kewarganegaraan maksimal, yaitu "Pendidikan untuk kewarganegaraan" yang mencakup pendekatan

pendidikan tentang kewarganegaraan dan pendidikan melalui kewarganegaraan yang mengkaitkan pendidikan kewarganegaraan dengan pengalaman pendidikan seluruh siswa..

## Referensi

- Alazmi, H. S. (2021). Leveraging international experts' perspectives to reframe citizenship in Social Studies Curriculum during the globalisation era: shifting to a global citizenship education. *Globalisation, Societies and Education*, 20(3), 1–19. <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1932434>
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2022). A systematic mixed studies review of civic engagement outcomes in environmental education. *Environmental Education Research*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2135688>
- Banks, J. A. (2020). Diversity, Transformative Knowledge, and Civic Education. In *Routledge eBooks*. Informa. <https://doi.org/10.4324/9781003018360>
- Casmana, A. R., Dewantara, J. A., Timoera, D. A., Kusmawati, A. P., & Syafrudin, I. (2022). Global citizenship: preparing the younger generation to possess pro-environment behavior, mutual assistance and tolerance awareness through school engagement. *Globalisation, Societies and Education*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.2013167>
- Crone, D. L., Bode, S., Murawski, C., & Laham, S. M. (2018). The Socio-Moral Image Database (SMID): A novel stimulus set for the study of social, moral and affective processes. *PLOS ONE*, 13(1), e0190954. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190954>
- Darling-Hammond, L., & McGuire, K. (2023). Policy for Civic Reasoning. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 232–248. <https://doi.org/10.1177/00027162231193276>
- Engartner, T., & Schedelik, M. (2023). Civic Education and Democratic Identity in Contemporary Germany: Pedagogical Principles and Didactic Challenges in Times of Right-Wing Populism. *German Politics*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/09644008.2023.2251118>
- Feitosa, F. (2020). Does Civic Education Foster Civic Duty? A Systematic Cross-Country Analysis of the Effect of Three Forms of Civic Education on the Sense of Civic Duty to Vote. *Canadian Journal of Political Science*, 53(4), 1–15. <https://doi.org/10.1017/s0008423920000669>
- Fuentes-Moreno, C., Sabariego-Puig, M., & Ambros-Pallarés, A. (2020). Developing social and civic competence in secondary education through the implementation and evaluation of teaching units and educational environments. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0530-4>
- Gómez, R. L., & Suárez, A. M. (2023). Pedagogical practices and civic knowledge and engagement in Latin America: Multilevel analysis using ICCS data. *Heliyon*, 9(11), e21319–e21319. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21319>
- Hayes, K. N., Preminger, L., & Bae, C. L. (2023). Why does teacher learning vary in professional development? Accounting for organisational conditions. *Professional Development in Education*, 50(1), 108–128. <https://doi.org/10.1080/19415257.2023.2283433>
- Hillygus, D. S., & Holbein, J. B. (2023). Refocusing Civic Education: Developing the Skills Young People Need to Engage in Democracy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 73–94. <https://doi.org/10.1177/00027162231177798>
- Idrus, M. M., Hashim, R. S., & Mohd Mydin, R. (2020). Postcolonial Civic Identity and Youth (dis)organizing Environment: A Growth into Citizenship Analysis. *GEMA Online® Journal of Language Studies*, 20(2), 133–147. <https://doi.org/10.17576/gema-2020-2002-08>
- Jeffery-Schwikkard, D., Li, J., Nagpal, P., & Lomas, T. (2024). Systematic review of character development in low- and middle-income countries. *The Journal of Positive Psychology*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/17439760.2024.2322464>
- Joris, M., & Agirdag, O. (2019). In search of good citizenship education: A normative analysis of the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). *European Journal of Education*, 54(2), 287–298. <https://doi.org/10.1111/ejed.12331>

- Kayaalp, D. (2019). Towards Culturally Responsive Education: A Qualitative Approach. *European Journal of Education*, 2(2), 77. <https://doi.org/10.26417/ejed-2019.v2i2-65>
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education : an international comparison*. Qualifications And Curriculum Authority.
- Levy, B. L. M., Busey, C. L., Cuenca, A., Evans, R. W., Halvorsen, A.-L., Ho, L.-C., Kahne, J., Kissling, M. T., Lo, J. C., McAvoy, P., & McGrew, S. (2023). Social studies education research for sustainable democratic societies: Addressing persistent civic challenges. *Theory & Research in Social Education*, 51(1), 1–46. <https://doi.org/10.1080/00933104.2022.2158149>
- Li, X., Tang, B., & Li, H. (2023). AdaER: An adaptive experience replay approach for continual lifelong learning. *Neurocomputing*, 572, 127204–127204. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.127204>
- Lin, C., & Jackson, L. (2019). From Shared Fate to Shared Fates: An Approach for Civic Education. *Studies in Philosophy and Education*, 38(5), 537–547. <https://doi.org/10.1007/s11217-019-09658-z>
- Liu, G. (2023). Information-based theory of psychological education and the penetration of college Civics courses in student teaching. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00937>
- Luoto, J. M. (2023). Comparative education and comparative classroom observation systems. *Comparative Education*, 59(4), 1–20. <https://doi.org/10.1080/03050068.2023.2173917>
- McLaughlin, T. H. (1992). Citizenship, Diversity and Education: a philosophical perspective. *Journal of Moral Education*, 21(3), 235–250. <https://doi.org/10.1080/0305724920210307>
- Morais, D. B., & Ogden, A. C. (2010). Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale. *Journal of Studies in International Education*, 15(5), 445–466. <https://doi.org/10.1177/1028315310375308>
- Österman, M., & Robinson, D. (2022). Educating Democrats or Autocrats? The Regime-Conditional Effect of Education on Support for Democracy. *Political Studies*, 71(4), 003232172110673. <https://doi.org/10.1177/00323217211067385>
- Piel, L. H. (2019). The School Diary in Wartime Japan: Cultivating morale and self-discipline. *Modern Asian Studies*, 53(04), 1004–1037. <https://doi.org/10.1017/s0026749x17000439>
- Setyaningrum, A., & Misbah, M. (2023). Islam, Education and Radicalism in Indonesia: Instructing Piety. *Teaching Theology & Religion*, 26(1), 58–60. <https://doi.org/10.1111/teth.12632>
- Suwignyo, A. (2023). Higher Education as an Instrument of Decolonisation: The Community Service Programme in Indonesia, 1950–1969. *Asian Studies Review*, 48(3), 1–20. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2222225>
- Tröhler, D. (2023). Comparative education or epistemological power games for world domination. *Comparative Education*, 59(3), 1–17. <https://doi.org/10.1080/03050068.2023.2185358>
- Ünal, F., & Kaygın, H. (2019). Citizenship Education for Adults for Sustainable Democratic Societies. *Sustainability*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.3390/su12010056>
- Weinberg, J. (2021). Civic education as an antidote to inequalities in political participation? New evidence from English secondary education. *British Politics*, 17(2). <https://doi.org/10.1057/s41293-021-00186-4>